

**TESIS**

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM  
MEMBERIKAN JASA HUKUM TANPA  
MEMUNGUT HONORARIUM KEPADA  
MASYARAKAT TIDAK MAMPUDI KOTA  
PALANGKA RAYA**



**Diajukan Oleh:  
SANTIKA DEWI, S.H.  
NIM. 2220216320001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN  
JASA HUKUM TANPA MEMUNGUT  
HONORARIUM KEPADA MASYARAKAT  
TIDAK MAMPUDI KOTA PALANGKA RAYA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:  
SANTIKA DEWI, S.H.  
NIM. 2220216320001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

**Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal .....**

**PEMBIMBING**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr/ Hj. Rahmida Eriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santika Dewi  
NIM : 2220216320001  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkura  
Judul Tesis : **“Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Memungut Honorarium Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Palangka Raya”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



Santika Dewi, S.H.  
NIM. 2220216320001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 188/UNB.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Santika Dewi**

Dengan Judul Tesis :

Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum

Tanpa Memungut Honorarium Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Kota Palangka Raya

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq$  20%, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 14 Juni 2024  
Prof. Dr. Ir. Dwiang Biyatmoko,  
Direktur



Prof. Dr. Ir. Dwiang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



# **KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM TANPA MEMUNGUT HONORARIUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALANGKA RAYA**

**Oleh:**

**Santika Dewi<sup>1</sup>, Erham Amin<sup>2</sup>, Program Studi Kenotariatan,  
Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman**

## **RINGKASAN**

Notaris memiliki peran penting dalam bidang hukum dengan wewenang membuat akta autentik. Mereka membantu masyarakat dalam tindakan hukum dan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat dan penting dalam hubungan hukum masyarakat. Notaris memiliki kewajiban etis dan moral dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, negara, dan organisasi profesi. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki integritas dan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kode etik yang menjadi sumpahnya. Mereka memiliki kewenangan dalam membuat akta yang mempunyai kekuatan autentik dan eksekutorial. Namun, notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara sukarela terhadap masyarakat yang tidak mampu membayar honorarium atas jasanya. Hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dan merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan hukum. Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki berbagai suku bangsa dan agama yang mendiami wilayahnya. Meskipun tingkat kemiskinan di kota ini rendah, namun tidak menjamin bahwa semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk membayar honorarium notaris. Dengan jumlah notaris sebanyak 31 orang di kota Palangka Raya, penelitian mengenai penerapan Pasal 37 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma perlu dilakukan. Faktor-faktor seperti nilai-nilai yang

---

<sup>1</sup> 2220216320001

<sup>2</sup> Pembimbing

hidup dalam masyarakat, sanksi terhadap notaris yang melanggar peraturan, dan jenis sanksi yang dapat diberikan perlu diselidiki lebih lanjut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum tanpa memungut honorarium kepada masyarakat tidak mampu di Kota Palangka Raya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pandangan notaris dalam hal tersebut dan mengetahui jenis sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melanggar Pasal 37 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik notaris di Kota Palangka Raya dan memberikan gambaran mengenai penerapan keadilan dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mengkaji dan menganalisis implementasi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma – cuma terhadap orang yang tidak mampu. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sumbangan pemikiran untuk melengkapi bahan pustaka, guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum kenotariatan pada khususnya agar lebih memahami pemberian jasa hukum sesuai dengan tinjauan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah kualitatif empiris, yaitu setelah bahan primer, sekunder dan tersier terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dibahas dan diberi penjelasan untuk kemudian disimpulkan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan wawancara kepada 3 notaris yang ada di Kota Palangkaraya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *Statue Approach* dan *Conseptual Approach*.

Hasil penelitian pertama, Notaris memiliki berbagai macam jenis jasa yang dapat mereka lakukan, termasuk pembuatan berbagai jenis akta, perjanjian, surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan, akta wasiat, akta fidusia, dan lain sebagainya. Notaris memiliki kewajiban memberikan pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Namun, kriteria orang tidak mampu masih bersifat subjektif dan notaris perlu menilai klien berdasarkan informasi yang diberikan. Notaris biasanya memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan penyuluhan kepada klien yang membutuhkan. Untuk

mencapai kepastian hukum dalam pemberian jasa kenotariatan secara cuma-cuma, diperlukan adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta penerapan aturan tersebut dengan konsisten oleh notaris dan lembaga pengawas. Sanksi juga diperlukan untuk notaris yang melanggar ketentuan pemberian jasa cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Pengaturan yang baik dan kerjasama antara pemerintah, notaris, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Etika notaris terhadap penghadap yang mendatangi notaris juga penting, dimana notaris harus bertanggung jawab, hormat terhadap hak orang lain, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Kode etik notaris merupakan pedoman moral yang harus ditaati oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Notaris harus memberikan pelayanan jasa hukum secara profesional dan tidak boleh menolak penghadap yang membutuhkan bantuan hukum, terutama jika penghadap tersebut tidak mampu secara finansial.

Kedua, Sanksi administratif yang diberikan kepada Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat. Majelis Pengawas Notaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, serta menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Notaris harus memahami batasan tugas dan kewajiban yang diatur oleh UUN dan Kode Etik Notaris, dan dapat dikenakan sanksi jika tidak mematuhi. Selain itu, pengawasan dan penegakan kode etik notaris juga dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, dengan memberikan sanksi seperti teguran, skorsing, atau pemberhentian. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan mereka, serta menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan. Perlindungan hukum kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya juga penting, sehingga pemeriksaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip moral serta etika profesi.

**NOTARY'S OBLIGATION IN PROVIDING LEGAL SERVICES  
WITHOUT COLLECTING HONORARIUM TO THE HAVE-NOT  
SOCIETY IN PALANGKA RAYA MUNICIPALITY**

By  
Santika Dewi<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>  
Master of Notary Public Program, Lambung Mangkurat University, 102 pages

**ABSTRACT**

*Keywords: Notary's Obligation, Legal Services, The Have-not, Sanction*

The aims of this thesis writing are to study and analyze the implementation of Article Pasal 37 paragraph (1) of Notary Position Act Number 2 of 2014 regarding the obligation of the Notary to provide legal services free of charge to the have-not. The type of this research is qualitative empirical, namely after the primary, secondary, and tertiary legal resources collected, are analyzed based on the data obtained from the field and library, both oral and written, and further to be elaborated and explained in order to be concluded. Sample collection technique in this research is purposive sampling, namely through interview to 3 (three) Notaries practicing in Palangka Raya municipality. The approaches applied are statute approach and conceptual approach. The conclusions of this research are that the Notaries apply the obligation to provide legal services to the have-not, namely by providing legal services free of charge for the notary services, but still collecting the costs which the clients are obliged to pay such as Non Tax State Revenue (PNBP). The criteria for the have-not who is entitled to receive such free of charge services is not yet clear or not yet regulated, the judgment is still objective depending on the Notary. The violation committed by the Notary can be sanctioned by the Regional Supervisory Council, such as oral warning and written warning, and the Council can propose to the Central Supervisory Council for temporary termination for 3 (three) months up to 6 (six) month and dishonorable dismissal.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup> Student number: 2220216320

<sup>2</sup>Supervisor

# **KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM TANPA MEMUNGUT HONORARIUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PALANGKA RAYA**

Oleh:

**Santika Dewi<sup>5</sup>, Erham Amin<sup>6</sup>, Program Studi Kenotariatan,  
Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Kewajiban Notaris, Jasa Hukum, Orang Tidak Mampu, Sanksi

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mengkaji dan menganalisis implementasi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma – cuma terhadap orang yang tidak mampu. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sumbangan pemikiran untuk melengkapi bahan pustaka, guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum kenotariatan pada khususnya agar lebih memahami pemberian jasa hukum sesuai dengan tinjauan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah kualitatif empiris, yaitu setelah bahan primer, sekunder dan tersier terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data berdasarkan yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dibahas dan diberi penjelasan untuk kemudian disimpulkan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan wawancara kepada 3 notaris yang ada di Kota Palangkaraya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *Statue Approach* dan *Conseptual Approach*. Kesimpulan penelitian ini adalah Notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jasa notarisnya, namun tetap menarik biaya yang wajib dikeluarkan oleh klien seperti biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kriteria orang tidak mampu yang berhak menerima jasa cuma- cuma masih belum jelas atau perlu diatur lebih lanjut, penilaian masih bersifat subjektif dari notaris. Pelanggaran yang dilakukan notaris dapat diberikan sanksi oleh majelis pengawas, yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (Enam) bulan dan pemberhentian secara tidak hormat.

---

<sup>5</sup> NIM 2220216320001

<sup>6</sup> Pembimbing

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM TANPA MEMUNGUT HONORARIUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPUDI KOTA PALANGKA RAYA**”.

Tesis ini disusun bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari dalam terselesainya penelitian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi serta bimbingan beberapa pihak terutama dalam kesempatan ini dan terkhusus pada lembar ini peneliti mendedikasikan dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada dr. Rahman Ardiansyah, M.M.R.S. selaku kekasih hatiku yang sudah memberikan *support* dan menjadi *important role* sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Adapun peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman untuk penelitian serupa kedepannya.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT Berkat dan Rahmat-Nya yang berlimpah telah memberikan kekuatan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM TANPA MEMUNGUT HONORARIUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPUDI KOTA PALANGKA RAYA”**.

Tersusun dan selesainya tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari dalam terselesainya penelitian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak yang memberikan dukungan berupa materi, spiritual, pengetahuan kepada peneliti. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang selalu mendukung saya dan saudara saya Ida Bagus, Darmawida, Jaik Yases, Dimas, Andra, Ivi, Fiza, dan kekasih tercinta dr. Rahman Ardiansyah serta segenap keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan baik berupa doa, nasehat dan materil selama peneliti menyelesaikan studi ini.
2. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Prof . Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
4. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus serta tim penguji peneliti yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian tesis ini.
5. Dr. Saprudin, S.H., M.H., selaku tim penguji dalam penelitian tesis Seluruh Dosen dan Dosen Luar biasa yang mengajar di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Staf dan Pegawai Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan
7. Teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang tidak bisa disebutkan satu per satu telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta motivasi kepada peneliti hingga terselesainya tesis ini

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran dan kritikan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Peneliti berharap, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PLAGIASI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian	
1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
2. Jenis Penelitian .....	45
3. Tipe Penelitian .....	46
4. Objek dan Sampel Penelitian .....	46
5. Pendekatan Penelitian .....	47
6. Sumber Data Penelitian .....	48
7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
8. Analisis Data Penelitian .....	51
G. Sistematika Penelitian .....	52

**BAB II TOLAK UKUR BAGI NOTARIS DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 37 UNDANG – UNDANG  
JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014**

A. Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu .....	53
B. Kepastian Hukum dalam Pemberian Jasa Kenotariatan Secara Cuma-Cuma .....	58
C. Etika Notaris Terhadap Penghadap yang Mendatangi Notaris .....	64

**BAB III JENIS SANKSI DAN TANGGUNGJAWAB BAGI NOTARIS  
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN  
PASAL 37 UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2  
TAHUN 2014**

A. Jenis Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Menolak Untuk Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu .....	70
B. Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu .....	76

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

